

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedikit demi sedikit mengalami pemulihan setelah dilanda krisis hebat tahun 1998 dan krisis global tahun 2008. Beberapa indikator makro ekonomi pun mengalami pertumbuhan dan penguatan. Hal ini juga terjadi pada tingkat pengangguran di Indonesia. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2009 tercatat sebanyak 8,96 juta orang atau 7,87%. Angka itu menurun dibanding Februari 2009 yang sebanyak 9,26 juta orang (8,14%), maupun dibandingkan Agustus 2008 yang sebanyak 9,39 juta orang (8,39%).

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2009 mencapai 113,83 juta orang, bertambah 90 ribu orang dibanding jumlah angkatan kerja Februari 2009 sebesar 113,74 juta orang atau bertambah 1,88 juta orang dibanding Agustus 2008 sebesar 111,95 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2009 mencapai 104,87 juta orang, bertambah 380 ribu orang dibanding keadaan pada Februari 2009 sebesar 104,49 juta orang, atau bertambah 2,32 juta orang dibanding keadaan Agustus 2008 sebesar 102,55 juta orang.

Namun demikian, peningkatan lapangan kerja tersebut bukan dari sektor formal melainkan dari sektor informal. Kesempatan kerja informal yang mampu disediakan kedua sektor itu jauh lebih tinggi daripada kesempatan kerja formal. Ini berarti bahwa proses informalisasi kesempatan kerja sedang terjadi di dalam perekonomian Indonesia. Ini tidak sehat bagi perekonomian.

Untuk meningkatkan angkatan kerja dari sektor formal tentunya harus diikuti dengan SDM yang berkompeten di bidangnya. Masih kurangnya pendidikan yang dapat menyiapkan tenaga kerja sektor formal menyebabkan tingkat pengangguran juga masih tinggi. Data BPS menyebutkan, pada Agustus 2009, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 55,21 juta orang (52,65%), sedangkan pekerja dengan pendidikan diploma hanya sebesar 2,79 juta orang (2,66%) dan pekerja dengan pendidikan sarjana hanya sebesar 4,66 juta orang (4,44%).

Salah satu penyebab tenaga kerja sektor formal masih rendah dibandingkan tenaga kerja sektor informal adalah masih adanya kesenjangan antara lulusan SMA dengan SMK. Peminat SMA lebih tinggi dari peminat SMK, padahal lulusan SMA hanya sedikit saja yang melanjutkan ke perguruan tinggi, selebihnya masuk ke dunia kerja. Kurangnya peminat SMK membuat pemerintah gencar mempromosikan SMK kepada masyarakat. Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah untuk menarik peminat SMK, seperti membuat iklan, meningkatkan infrastruktur, menambah jumlah tenaga pendidik, menyempurnakan bidang keahlian dan lain-lain.

Pada tahun 2005, muncul kebijakan tentang peningkatan rasio SMK:SMA sebesar 70:30 pada tahun 2014, dimana sebelumnya hanya sebesar 60:40. Hal ini kembali dikemukakan oleh Mendiknas, Bambang Sudibyo pada saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Depdiknas, Jakarta (Kompas,2/05/2009). Kebijakan tersebut merupakan salah satu dari sebelas terobosan masal pendidikan, yakni melanjutkan pendanaan pendidikan secara massal, melanjutkan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik, penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk e-pembelajaran dan e-administrasi, pembangunan

prasarana dan sarana pendidikan, rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, dan reformasi perbukuan secara mendasar. Selanjutnya, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif, perbaikan rasio peserta didik SMK:SMA, otonomisasi satuan pendidikan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal untuk menggapai layanan pendidikan kepada peserta didik yang tidak terjangkau pendidikan formal (*reaching the unreached*), serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif.

Selain itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Harian Umum Pakuan, 19/05/2009) juga mengatakan untuk mengejar target pemerintah provinsi memerlukan perencanaan dan *blue print* dalam penyediaan sarana dan prasarana SMK. Saat ini jumlah bangunan sekolah di Jabar menunjukkan SMK 52% dan SMA 48%, tapi jumlah siswanya masih banyak SMA. Data Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mencatat, SMK di Jabar ada 1.120 dan SMA 1.198 yang tersebar di 26 kabupaten/kota.

Dengan adanya kebijakan tersebut seyogyanya diikuti dengan peningkatan infrastruktur sekolah. Infrastruktur menjadi sangat penting karena merupakan faktor yang krusial. Peningkatan infrastruktur tersebut seperti pembangunan sekolah-sekolah dan pemenuhan fasilitas penunjang. Namun sekarang pertanyaannya apakah dengan adanya kebijakan tersebut juga diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi kebutuhan serta memenuhi standar? oleh karena itu penelitian ini dilakukan, agar memperoleh gambaran dan jawaban yang tepat dalam menjawab hal tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang dapat ditemukan terkait evaluasi penyediaan sarana dan prasarana atas kebijakan peningkatan rasio SMK : SMA menjadi 70:30, adalah:

1. Ketersediaan jumlah SMK yang masih dirasa kurang.
2. Perlunya rehabilitasi di beberapa sekolah guna meningkatkan infrastruktur
3. Kurang optimalnya prasarana penunjang praktek siswa, khususnya dalam hal alat-alat pembelajaran

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketersediaan dan kondisi sarana prasarana SMK Negeri di kota Bandung saat ini?
2. Apakah sarana dan prasarana SMK Negeri di kota Bandung telah sesuai dengan standar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui ketersediaan dan kondisi sarana prasarana SMKN kota Bandung saat ini.
2. Mengetahui sejauh mana kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di kota Bandung dapat memenuhi standar yang telah

ditetapkan pemerintah, sehingga hasilnya menjadi bahan evaluasi atas kebijakan pemerintah mengenai peningkatan rasio SMK dan SMA menjadi 70:30.

E. Penjelasan Istilah dalam Judul

1. Evaluasi menurut Suchman (1961) dalam Arikunto (dikutip oleh Iwan Wahyudin, 2006:7) adalah “sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”.
2. Peningkatan rasio, adalah bertambahnya suatu hubungan dalam tingkat atau jumlah antara dua hal yang mirip atau serupa
3. SMK adalah Sekolah Menengah Atas, merupakan sekolah lanjutan setelah sekolah menengah pertama. Sekolah ini melatih keterampilan siswa agar siap masuk dunia kerja
4. SMA adalah Sekolah Menengah Atas, sekolah lanjutan sekolah menengah pertama, sekolah ini disiapkan untuk siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi.
5. Pemenuhan standar, adalah pemenuhan suatu batas minimal yang telah disepakati.
6. Sarana, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (Kamus Bahasa Indonesia, 2003 dalam Yustioni, 2007:35)
7. Prasarana, mencakup segala hal yang menunjang secara tidak langsung pada pencapaian tujuan (Suprihatin, 2004 dalam Yustioni, 2007:6)

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu memberikan gambaran yang jelas sesuai analisis yang empirik mengenai pemenuhan standar sarana dan prasarana sekolah, dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di kota Bandung. Maka dengan hasil analisis tersebut selanjutnya dievaluasi agar dapat dijadikan landasan bagi penentu kebijakan dalam menerapkan kebijakannya. Disamping itu, evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menilai dan meningkatkan kualitas serta kebijakan program.

Sedangkan bagi SMK, penelitian ini dapat memotivasi perangkat pendidik dan tenaga kependidikan SMK untuk mempersiapkan diri dalam mengejar target kebijakan peningkatan rasio perbandingan SMK dan SMA menjadi 70:30.